**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA DAN PROPOSISI**

1. **KAJIAN PUSTAKA**
2. **Pengertian Administrasi**

Administrasi muncul dan berkembang akibat adanya kebutuhan manusia untuk bekerjasama guna mencapai tujuan yang tidak dapat dihasilkan secara perorangan. Hal ini berkaitan dengan hakekat sifat manusia sehingga dengan keterbatasannya mendorong manusia untuk bekerja demi mencapai tujuan yang diinginkan.

**Silalahi (2009:5)** administrasi secara sempit yaitu: **penyusunan dan pencatatn data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam hubungan satu sama lain.**

Administrasi merupakan kegiatan-kegiatan sekelompok orang melalui proses kerjasama baik dalam suatu organisasi maupun antara organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama sebelumnya hal ini sesuai dengan pengertian administrasi ssecara luas menurut  **Silalahi (2009:11)** adalah: **Kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagian ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.**

Pengertian diatas mengatakan manfaat sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efesien. Efektif yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memiliki tujuan yang tepat dari serangkaian alternative sedangkan efesien merupakan penggunaan sumber daya secara minimum guna mencapai hasil yang optimum.

**Siagian,** dikutip **Silalahi (2009:9)** administrasi adalah “keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.”

**Adams,** dikutip **Syarif (2012)** administrasi adalah:

***Administration is the capacity of coordinating many, and often conflicting social energies in a single organism, so adroitly that they shall operate as a unity* (Administrasi asalah kemampuan mengkordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain di dalam satu otganisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan).**

Berdasarkan pengertian administrasi tersebut maka peneliti menyimpulkan, bahwa administrasi adalah proses kegiatan kerjasama sekelompok orang dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama secara efektif dan efesien.

1. **Pengertian Administrasi Negara**

Pengertian Administrasi Negara istilah administrasi Negara ialah terjemahan dari ***“public administrations”.*** Istilah ini lahir bersamaan dengan lahirnya Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada sekitar tahun 1956. Jika istilah *public administration* itu diuraikan secara etimologis, maka *“public”* berasal dari bahasal Latin *“poplicus”* yang semula dari kata *“populous”* atau *“people”* dalam bahasa Inggris yang berarti rakyat. “Administration” juga berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari kata *“ad”* artinya intensif dan *“ministrare”* artinya melayani, jadi secara etimologis administrasi berarti melayani secara intensif.

**Jhon M Pfiffner and Robert V Presthus** dalam buku **“Public Administration”** yang dikutip oleh **Soewarno Handayaningrat** dalam bukunya **“Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management” (1986:3)**, mengemukakan: **“Administrasi Negara adalah suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan Negara.”**

Di Indonesia Badan Perwakilan Politik yang menetapkan Kebijakan Negara ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai Lembaga Legislatif.

**Dimock** dalam bukunya **“Public Administration”** yang diterjemahkan oleh **Soewarno Handayaningrat** dalam bukunya **“Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen” (1985:3)**, mengemukakan bahwa: **“Administrasi Negara adalah kegiatan Negara dalam melaksanakan kekuasaan atau kewenangan politiknya.”**

**White** dalam **Sukarna (1986:14)**, mengemukakan bahwa: **“Administrasi Negara terdiri dari semua atau seluruh aktivitas atau kegiatan yang bertujuan pemenuhan atau pelaksanaan Kebijakan Negara.”**

Berdasarkan pengertian Admnistrasi Negara yaitu semua aktivitas atau kegiatan yang bertujuan pelaksanaan Kebijakan yang telah disepakati oleh Negara.

Bertolak dari definisi-definisi tersebut diatas, jika dilihat dari sudut Ilmu Administrasi Negara **Kahya (1996:4)**, mengemukakan bahwa: **Administrasi Negara ialah suatu ilmu yang mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh alat-alat Negara untuk melaksanakan atau mewujudkan Politik Negara atau Politik Pemerintahan.**

Berdasarkan pengertian diatas Administrasi Negara yaitu ilmu yang mempelajari kegiatan yang dilakukan Negara untuk melaksanakan Politik Negara.

Objek disiplin Ilmu Administrasi Negara adalah pelayanan politik sehingga yang perlu dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik. Maka **Musolf dan Seidman**, melihat batasan-batasan administrasi publik.

Hal ini karena bagi mereka tampak bahwa setiap keadaan yang bertambah maju, pemerintahpada semua tingkat memberikan tanggung jawab aktivitas yangpenting dan kompleks, namun ada lembaga yang semu (apakah yang bersangkutan termasuk lembaga administrasi pemerintah atau swasta).

Kencenderungan ini dicerminkan dalam kegiatan pemerintah mensponsori perusahaan swasta, badan hukum yang tidak mencari keuntungan dan pusat-pusat penelitian dikontrak. Untuk itu kita harus melihat kepada siata *Responsibility* dan *accountability* disampaikan. **Caiden**, memberikan patokan untuk menentukan apakah suatu organisasi pemerintah tersebut adalah dengan melihat tiga hal, yaitu: organisasinya di bentuk dengan peraturan pemerintah, karyawan disebut pegawai negeri, dan pembiayaannya berasal dari uang rakyat.

**Syafiie (2003:32)**, mengemukakan bahwa ada tujuh hal khusus dari Administrasi Negara, yaitu:

1. Tidak dapat dielakan *(unavoidable)*
2. Senantiasa mengharapkan ketaatan *(expect obedience)*
3. Mempunyai prioritas *(has priority)*
4. Mempunyai pengecualian *(has exceptional)*
5. Puncak pimpinan politik *(top management political)*
6. Sulit diukur *(difficult of measure)*
7. Terlalu banyak mengharapkan dari administrasi publik *(more is expected of public administration)*
8. **Pengertian Manajemen**

Kata manajemen berasal dari bahasa Italia sejak 1951 *managgiare*yang berarti “mengendalikan”. Terutamanya “mengendalikan kuda” yang berasaldari bahasa lain *manus* yang berarti “kepemilikan kuda” (yang berasal dari bahasa inggris yang berarti seni mengendalikan kuda), dimana istilah inggris ini juga berasaldari bahasaitalia. Bahasa prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa inggris menjadi management. Yakni memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur”.

Menurut **Agus Darma** dalam bukunya **Manajemen Perilaku Organisasi (2003:15)** menyebutkan **“Manajemen adalah proses kerjasama dengan orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi**”.

Menurut **A.W. Widjaja** dalam buku **Administrasi Kepegawaian (1995:13)** menjelaskan **“Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengontrolan *human and nature resource* untuk mencapai yang telah ditentukan terlebih dahulu”.**

Menurut **Siagan P. Sondang** dalam buku **Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (1985:5)** manajemen adalah **“Kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan kegiatan orang lain”**.

Sedangkan menurut **Soekidjo Notoatmodjo** dalam buku **Pengembangan Sumber Daya Manusia (2003:116)** bahwa manajemen adalah **“Suatu seni mengatur oranglain guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan”**. Batasan ini mengandung pengertian bahwa seorang manajer pmpinan dalam suatu organisasi dalam memimpin organisasinya untuk mencapai tujuam adalah bersama-sama dengan orang lain atau bawahannya.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang (manajer) untuk menggerakan seseorang (sekelompok orang) dan mengerahkan segenap fasilitasnya yang ada dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

1. **Pengertian Manajemen Publik**

Konsep manajemen publik sesungguhnya merupakan studi yang berbangun daei berbagai disiplin ilmu. Hal ini mengandung arti bahwa kahadiran manajemen publik secara keilmuan ditopang oleh disiplin ilmu lain, seperti ilmu manajemen, administrasi publik, kebijakan publik, ilmu politik dan lain-lain. Gabungan dari berbagai disiplin itulah yang kemudiam menginspirasi lahirnya manajemen publik.

Menurut **Overman (2004:85)** mengemukakan pendapatnya mengenai manajemen publik sebagai berikut:

**Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen, seperti *planning, organizing, controlling* satu sisi dengan sumber daya manusia, keuangan, informasi dan politik disisi lain.**

Menurut **Pasolong (2007:83)** menterjemahkan manajemen publik sebagai **“Manajemen instansi pemerintah”**. Kendati pengertian seperti ini mengandung makna yang sangat umum, namun esensinya menyentuh kepada bagaimana upaya untuk mengelola suatu institusi pemerintah.

Mencermati berbagai pendapat, pandangan serta perkembangan manajemen publik belakangan ini, penulis berpendapat bahwa manajemen publik dapat diterjemahkan sebagai pengelolaan sektor-sektor publik yang dilakukan oleh institusi publik (pemerintah), baik terkait dengan aspek perencanaan, pengorganisasianm pengendalian strategi maupun evaluasi terhadap sumberdaya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi serta sumber daya lainnya yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pandangan diatas, mencerminkan bahwa manajemen publik akan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan yang sangat kompleks dan rumit. Pandangan tersebut dilandasi oleh argumentasi bahwa manajemen publik tidak hanya bersentuhan dengan masalah kebijkan publik, politik dan keuangan semata. Tetapi juga akan bersentuhan dengan aspek lainnya. Itulah sebabnya, kemudian manajemen publik banyak mengilhami kegiayan administrasi publik yang menjadi *leading sector* dalam menjalankan sistem pemerintahan.

1. **Pengertian Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijkan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

**Nurdin Usman** dalam bukunya **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (200:70)** mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

**Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.**

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktvitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untutk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

**Guntur Setiawan** dalam bukunya **Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan (2004:39)** mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan peroses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.**

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat akrivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi tercapainya suatu tujuan uang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

**Hanifah Harsono** dalam bukunya **“Implementasi Kebijakan dan Politik”** mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut **“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijkan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijkan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.**

1. **Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menelaah suatu proses kebijakan terdapat aspek yang sangat penting yaitu implementasi kebijakan. Hal ini dinyatakan oleh **Dunn (2003:80)** mengemukakan **“Implementasi Kebijakan, adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan”**.

**Jones dalam Suyatna (2009:51)** mengemukakan **“Implementasi Kebijakan adalah proses mewujudkan program sehingga memperliharkan hasilnya *(those activities directed toward putting a program inti effect)*”**.

**Wahab (2002:64)** mengemukakan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut: **“Implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan keputusan-keputusan kebijakan (biasanya dari dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden)”.**

**Samodra Wibawa dkk (1994:15)** mengemukakan pengertian implementasi kebijakan publik: **“Implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta secara indivisu atau kelompok yang sikasudkan unruk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan”.**

**Vab Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:102)** memberikan batasan-batasan implementasi kebijakan yaitu:

**Implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.**

Menurut **Rian Nugroho D.** Pada prinsipnya ada empat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan dalam bukunya ***public policy*, teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan (2014:686),** adalah sebagai berikut:

1. Tepat Kebijakan

Adalah ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauhmana kebijakan yang telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkn maslaahyang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excellent is the policy.* Sisi jedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah apakan kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

1. Tepat Pelaksanaannya

Adalah faktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah, ada tiga lembaga yang menjadi pelaksana yaitu, pemerintah, kerjasama antara pemerintah /masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang di swastakan, kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bisa memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan,senaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mmengarahkan kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau dimana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan insdustri-industri berkala menengah dan kecil yang tidak strategis, senaiknya diserahkan kepada masyarakat.

1. Tepat Target

Adalah ketepatan dengan berkenaan dengan tiga hal, pertam, apakah target yang di intervensi sesuai yang direncanakan, apakah tidak tumpang tindih dengan intervensi lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmonis dan apakah kondisi target dan kondisi mendukung atau menolak. Sosialisasi kebijakan dikawasan konflik tidaklah salah, namun pada prinsipnya mengulang kebijkana lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

1. Tapat Lingkungan

Adalah ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga lain yang terkait. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal yaitu yang disebut oleh Calista sebagai variabel eksogen yang terdiri dari *publik opinion* yaitu presepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan. *Intrepetative Instutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dari masyarakat, seperti media massa, kelompok penekanan, dan kelompok kepentingan dalam mengintrepretasikan ebijakan dan *individuals* yakni individu-individutertent yang mampu memainkan peran penting dalam mengintrepretasikan kebijakan da mengimplementasikan kebijakan.

1. Tepat Proses

Secara umum implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga proses yaitu:

1. *Policy Acceptance*, disini publik memahami sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintahmemahami sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
2. *Policy Adaption,* disini publik menerima sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah meneria sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Strategic Rediness,* disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijkan, disis lain birokrat *on the streeet* (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

**Wahab (1997:64)** memberikan kesimpulan tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut:

**Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan adminstratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial.**

Untuk menemukan keberhasilan di dalam perimplementasian suatu kebijakan maka diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan oleh para aktor implementasi demi mendukung kesuksesan kebijakan yang ada.

Karena keberhasilan suatu implemenrasi kebijkana dapat dukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir *(outout)*, yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih **(Agustini, 2006:139).**

1. **Teori-teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sah. Leo Agustino mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier.

Model implementasi kebijakan publik yang lainditawarkan oleh Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis.* Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuanya dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan,variabel-variabel yang dimaksud dapat diklarifikasika mnejadi tiga kategori besar, yaitu:

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi:
2. Kesukaran-kesukaran Teknis.

Tercapainya atau tidaknya tujua suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya: kemampuan untuk mengembangkan indicator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kasual yang mempengaruhi masalah. Di samping itu, tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

1. Keberagaman Perilaku yang Diatur.

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (aparatur, administrator, atau birokrat) di lapangan.

1. Presentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran.

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

1. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki.

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar atau sulit para pelaksana mencapai keberhasilan. Artinya, ada sejumlah smasalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan jika tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

1. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat.

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

1. Kecenderungan dan Kejelasan Penjenjangan Tujuan-tujuan Resmi yang akan Dicapai.

Semakin mampu seuatu peraturan memerikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas atau urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa *output* kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

1. Keterandalan Teori Kausalitas yang Diperlukan.

Menurut suatu teori kausalita yang menjelaskan bagaimana kira-kirantujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

1. Ketetapan Alokasi Sumber Dana

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

1. Keterpaduan Hirarki di Dalam Lingkungan dan di Antara Lembaga-lembaga atau Instansi-instansi Pelaksana.

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga alpa dilaksanakan, maka koordinasi antar-instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

1. Aturan-aturan Pembuatan Keputusan dari Badan-badan Pelaksana

Selain dapat memberikan kejelasandan konsistensi tujuan, memper-kecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana.

1. Kesepakatan Para Pejabat Terhadap Tujuan yang Termaksud dalam Undang-undang.

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan galnya, oleh karena, *top-down policy* bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di level local.

1. Akses Formal Pihak-pihak Luar.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para actor di luar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar control pada para pejabat pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

1. Variabel-variabel di Luar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi.
2. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi.

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawatahan suatu kebijakan publik.

1. Dukungan Publik.

Hakikat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme pertisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

1. Sikap dan Sumber-sumber yang Dimiliki Kelompok Masyarakat.

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam *local genius* (kearifan local) yang dimiliki ileh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Dan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.

1. Kesepakatan dan Kemampuan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana.

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu, kemampuan berinteraksi antar lembaga atau individu di dalam lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi hal penting atas keberhasilan kinerja kebijakan publik.

1. Teori Kebijakan George C. Edward III

George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impacton Implementation.* Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Variabel pertama yang mempengaruhhi keberhasilan menurut Edward III adalah:

1. Komunikasi, menurutnya komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Yaitu:
2. Transmisisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miss komunikasi), dalam hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
3. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan *(street level bureucrats)* haruslah jelas dan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
4. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bari pelaksana di lapangan.
5. Sumber Daya, menurut Edward III sumber daya juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa. Yaitu:
6. Staff, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staff yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staff atau implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan pula kecukupan staff dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
7. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melaksanakan tindakan. Dan yang kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor hasil mengetahui apakan orang lain yang terlibat dildalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
8. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formasi agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara publik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi keslahan dalam melihat efektiitas kewenangan, disatu pihak efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan imlementasi kebijakan. Tetapi diselenggarakan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
9. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
10. Disposisi, disposisi atau sikap dari pelaksana keijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah:
11. Efek disposisi, disposisi atau sikap para pelaksaa akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
12. Melakukan pengaturan birokrasi *(staffing the bureucracy)*, dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini menunjuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuia dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja hingga metode *bypassing* personil.
13. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umunya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan, dengan cara menambah keberuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi *(self interest)* atau organisasi.
14. Struktur Birokrasi, walaupun sumber-suber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilaukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Munurut Edward III struktur birokrasi sangat mempengaruhi terlaksananya implementasi kebijakan. Indikator-indikator dari struktur birokrasi adalah:
15. SOP *(Standar Operating Procedure),* adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur administratur atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya *(days to days politics)* sesuai dengan standar yang telah ditentukan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

Fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel

1. **Langkah-langkah Implementasi Kebijakan**

Implementasi Kebijakan merupakan proses kedua di dalam perumusan kebijakan setelah melalui beberapa tahapan formulasi kebijakan. Dan di dalam pelaksanaannya terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. **Nugroho (2014:243)** merumuskannya menjadi tiga langkah dengan tujuan agar implementasi akan berhasil sebelum mulai mengimplementasikannya. Adapun langka-langkah tersebut yaitu:

1. Penerimaan kebijakan, pemahaman publik bahwa kebijakan adalah “aturan permainan” untuk mengelola masa depan. Khusus pengimplementasian kebijakan, seperti birokrat memahami bahwa kebijakan sebaiknya dilaksanakan dengan baik-baik bukan sebagai keistimewaan.
2. Adopsi kebijakan, publik setuju dan mendukung kebijakan sebagai “aturan permainan” untuk mengelola masa depan. Khusus pengimplementasi kebijakan, seperti birokrat memahami bahwa kebijakan sebaiknya dilaksanakan dengan baik bukan sebagai keistimewaan.
3. Kesiapan strategis, publik siap untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan dan birokrat siap untuk menjadi pengimplementasi utama, seperti yang anda ketahui tanggungjawabnya untuk menjalankan keleluasaan kebijakan.
4. **Faktor-faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan**

Faktor yang merupakan syerat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

1. Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan *(target group)* sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetisi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber dana, kebijakan hanya tinggal kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijkan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijkan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar *(standard operating procedures)* atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dijelaskan oleh Edward III secara singkat bahwa pedoman yang tidak akurat, jelas atau konsisten akan memberikan kesempatan kepada *Implementors* membuat direksi. Direksi ini bisa langaung dilaksanakan atau dengan jalan membuat petunjuk lebih lanjut yang ditujukan kepada pelaksana tingkat bawahnya. Jika komunikasi tidak baik maka direksi ini akan memunculkan disposisi. Namun komunikasi yang terlampau detail akan mempengaruhi moral dan independensi implementator, bergesernya tujuan dan terjadinya pemborosan sumber daya seperti keterampilan beraktivitas, kreatifitas, dan kemampuan adaptasi. Sumber daya saling berkaitan dengan komunikasi dan mempengaruhi disposisi dalam implementasi. Demikian juga disposisi dari implementor akan mempengaruhi bagaimana mereka menginterpretasikan komunikasi kebijakan baik dalam menerima maupun dalam mengelaborasi lebih lanjut kebawah rantai komando.

1. **Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan**

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1. Isi Kebijakan
2. Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
3. Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
5. Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya dana dan tenaga manusia.
6. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Infomasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

1. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

1. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik jua ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

1. **Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya **(Djaali, 2001:23)**.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan usaha informal yang bergerak dalam distribusi barang dan jasa. PKL, di satu sisi merupakan salah satu penggerak dalam perekonomian masyarakat pinggiran. Dalam bidang ini pedagang kaki lima hanya berpengaruh sebagai produsen yang penting bagi masyarakat Kota Bandung mengingat akan banyaknya masyarakat menengah maupun menengah ke bawah. (www.imannugraha.net/wp-content/files/PKL).

Kegiatan pedagang kaki lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sekaligus salah satu pilihan dalam menyediakan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif murah. Keberadaan pedagang kaki lima bagi masyarakat sangatlah penting sebagai penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pedangan kaki lima sangat mempengaruhi pola pasar dan sosial masyarakat Kota Bandung. Pengaruhnya meliputi ekonomi, sosial-budaya dan kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Pedagang kaki lima (PKL) dalam sektor ekonomi (LPPM USU, 2002:10) dapat dikemukan sebagai berikut:

1. Penggunaan ruang publik seperti jalan-jalan umum bukan untuk fungsi semestinya dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri.

2. Pencemaran yang dilakukan sering diabaikan oleh PKL, pola kegiatanya tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerjanya.

3. Sebagian besar PKL tidak mendapat perlindungan dari ancaman jiwa, kesehatan maupun jaminan masa depan. Resiko semacam itu belum mendapat perhatian, karena perhatian masih tertuju pada pemenuhan kebutuhan pokok.

4. Kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antara pengusaha yang membayar pajak resmi dengan pelaku ekonomi informal yang tidak membayar pajak resmi (walaupun mereka sering membayar “pajak tidak resmi/pungutan liar”), contohnya ada dugaan bahwa pemodal besar dengan berbagai pertimbangan memilih melakukan kegiatan ekonominya secara informal dengan menyebarkan operasinya melalui unit-unit PKL.

5. Ketiadaan perlindungan hukum menyebabkan pekerja di ekonomi informal rentan eksploitasi, baik pelaku di PKL itu sendiri, rekanan usaha dari sektor formal maupun dari oknum tertentu baik dari pemegang kebijakan lokal yang resmi maupun preman.

6. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga tidak resmi, dan perputaran modal usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga relatif kecil.

7. Timbulnya “parallel structure” yaitu kerangka aliran uang yang berupa setoran diluar aliran uang resmi atau pajak ke pemerintah. Hal tersebut menyebabkan ketergantungan sebagian oknum pemerintah pada keberadaan PKL.

 Oleh sebab itu, PKL dapat dianggap sebagai kegiatan ekonomi masyarakat kelas bawah. PKL memang pelaku ekonomi di pinggir jalan dan merupakan masyarakat miskin dan masyarakat marjinal. PKL dalam melakukan aktivitasnya dimana barang daganganya diangkut dengan gerobak dorong, bersifat sementara, dengan alas tikar tanpa meja serta memakai atau tanpa memakai tempat gantungan untuk memajang barang-barang jualannya, dan atau tanpa tenda, kebanyakan jarak tempat usahanya antara mereka tidak dibatasi oleh batas-batas yang jelas. Para PKL kini tidak mempunyai kepastian hak atas tempat usahanya.

1. **Pengertian Ketertiban Umum**

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, dalam bahasa Prancis *“orde publik”,* dalam bahasa Jerman *“vorbehhaltklausel”*, dan di negara-negara dengan sistem *commom law* disebut *publik policy*. Istilah *policy* dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politik, dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Ketertiban umum memegang peranan penting, dalam arti setiap sistem hukum negara manapun memerlukan ancaman atau “rem darurat” yang disebut dengan istilah ketertiban umum (Limbong, 2006:113).

Menurut Kantaatmadja (Dalam Limbong, 2006:34) ketertiban umum dalam arti luas merupakan kata lain dari kepentingan umum, adalah untuk mencapai tujuan negara “masyarakat adil dan makmur”. Aspek ketertiban umum merupakan salah satu kebutuhan masyarakat baik masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan dengan ketertiban umum terdapat suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Meningkatnya kegiatan PKL hingga menguasai trotoar maupun sebagian besar badan jalan dapat mengganggu kepentingan kehidupan bersama, dimana para pejalan kaki terganggu kenyamanannya sebab trotoar dimanfaatkan untuk tempat berdagang (Soegeng, 2005:15).

Pedagang Kaki Lima (PKL) mengetahui berdagang di trotoar jalan sangat mengganggu ketertiban umum. Adanya pengetahuan PKL terhadap ketertiban umum ternyata tidak menimbulkan adanya kesadaran hukum akan ketertiban lingkungan. Hal tersebut karena dorongan rasa lapar para PKL. Di samping itu, kepedulian pemerintah terhadap golongan masyarakat tersebut sangatlah kurang, sehingga dengan melihat ruang kosong dan mempunyai potensi ekonomi maka para PKL memanfaatkan lokasi tersebut untuk berjualan (LPPM USU, 2002:13). Pada dasarnya PKL mengetahui adanya larangan berjualan di pinggir jalan umum atau bahkan memanfaatkan sebagian badan jalan untuk berjualan dapat mengganggu ketertiban umum terutama mengganggu kelancaran lalu lintas yang menyebakan kemacetan lalu lintas, namun kenyataannya tetap saja para pedagang tersebut melakukan aktivitas. Hal ini menunjukkan seakan-akan para PKL tidak peduli terhadap ketentuan peraturan yang melarang aktivitas berjualan.

 Ada beberapa hal yang teridentifikasi mengapa para PKL tidak tergganggu dengan adanya larangan berjulan tersebut adalah:

1. Para penegak hukum tidak tegas dalam menerapkan sanksi hukum.
2. Para PKL merasa bahwa mereka sebagai pedagang legal berjualan di kaki lima karena kutipan retribusi dilakukan oleh petugas dari pemerintah daerah.
3. Para PKL tidak mempunyai pilihan lain untuk mencari nafkah, jika pedagang tersebut terkena kegiatan penertiban maka hal ini dianggap sebagai hari yang “naas” yang tidak perlu disesalkan, karena setelah itu pedagang tersebut masih dapat berjualan.
4. **PROPOSISI**

Peneliti memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima dalam menertibkan para pedagang kaki lima, guna untuk terwujudnya lingkungan yang bersih dan rapih yang telah ditata oleh pemerintah.

Faktor yang menghambat penertiban pedagang kaki lima karena pkl yang ada di daerah cicadas kebanyakan berdomisili di tempat tersebut sehingga masyarakat akan tetap berjualan disana karena menganggap tempat tersebut adalah tempat tinggal mereka.

Pemerintah Kota Bandung sejauh ini telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan K3 (keindahan, ketertiban, kebersihan).

Sedangkan dimensi implementasi kebijakan disini yang akan diterapkan dalam upaya penertiban pedagang kaki lima, ialah Menurut Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik